

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Zakat

Zakat dari segi bahasa, kata “zakat” merupakan *mashdar* (kata dasar) dari “*zaka*” yang berarti menumbuhkan, memurnikan (mensucikan), memperbaiki, artinya sama dengan pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.<sup>1</sup> Dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>2</sup> Sedangkan dalam undang-undang tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup>

Seseorang akan dinilai keIslamannya apabila telah melaksanakan rukun Islam. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi dan amat diperhitungkan nilainya dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ... ﴿١١﴾

---

<sup>1</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3* (Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf. 1995), h. 235.

<sup>2</sup> Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk., dari judul asli *Fiqh Al-Zakat*, (Bogor: Lintera Antarnusa, 2011), Cet. XII. h. 34.

<sup>3</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Petunjuk Teknis Akreditasi LPZ*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h.48.

*Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.”*<sup>4</sup>

Zakat dalam syariat Islam merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan. Konsekuensinya, kalau dikerjakan mendapat pahala, dan meninggalkannya akan mendapat dosa. Dari 100 persen harta yang didapat, Allah SWT hanya memerintahkan 2,5 persen saja untuk dizakatkan.<sup>5</sup> Selain sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba atas rezeki yang diterima, zakat juga sebagai jalan untuk membersihkan harta.

Zakat selain dapat membersihkan harta, dapat pula menumbuhkan harta. Hal ini dikarenakan zakat memiliki dua makna, membersihkan dan menumbuhkan. Makna zakat sebagai ibadah yang dapat menumbuhkan harta terdapat dalam AlQuran:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

*Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”*<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Q.S. At-Taubah (9): 11

<sup>5</sup> Herman, *Zakat Sebagai Kebutuhan, Bukan Beban*, (Bandung: LAZNAS DPU-DT, 2017) Tabloid Swadaya, Oktober 2017.

<sup>6</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 261.

Ayat di atas merupakan perumpamaan yang diberikan Allah Ta'ala mengenai pelipat-gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalan-Nya dengan tujuan untuk mencari keridhaan-Nya. Dan bahwasanya kebaikan itu dilipat-gandakan mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat.<sup>7</sup>

Firman Allah SWT tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah atau dalam hal ini disebut dengan berzakat, maka Allah akan memberi balasan berkali-kali lipat. Adanya zakat tidak hanya menguntungkan bagi satu sisi, tapi Allah menjadikannya baik bagi semua sisi. Sebab zakat selain dapat menyucikan dan menumbuhkan harta bagi yang mengeluarkannya, zakat juga mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan masyarakat sampai ke tingkat seminimal mungkin.

## **B. Landasan Hukum Zakat**

Perintah berzakat hukumnya wajib bagi setiap umat Islam yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat *nishab*. Dasar hukum diwajibkannya zakat berlandaskan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan *Ijtihad* para Ulama.

### **1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran**

Terdapat banyak sekali perintah zakat yang diterangkan dalam

Al-Qur'an beberapa di antaranya:

---

<sup>7</sup> Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan dari Buku Asli *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dkk (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2004), h.499

## a. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>8</sup>

Tafsir dari ayat di atas menurut Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm adalah dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk menarik zakat dari kaum muslimin yang wajib dikeluarkan. Allah SWT menerangkan kewajiban zakat dalam Al-Quran kemudian Dia juga menerangkan masalah ini melalui lisan Rasulullah SAW atas segala jenis harta yang dizakati. Allah SWT menjelaskan bahwa harta yang harus dizakati ada yang zakatnya gugur, ada yang zakatnya tetap harus dibayarkan, dan ada sebagian harta yang tidak wajib dizakati.<sup>9</sup>

## b. Al-Qur'an surat Al-An'aam ayat 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝١٤١﴾

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Q.S. At-Taubah (9) : 103

<sup>9</sup> Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Quran*, Terjemahan dari Judul Asli *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2008), Jilid 2: Surah an-Nisa – Surah Ibrahim, h.662

<sup>10</sup> Q.S. Al-An'aam (6) : 141

Tafsir ayat di atas menurut Ibnu Katsir, Allah SWT dalam firmanNya menjelaskan bahwa Dia adalah yang menciptakan segala sesuatu yang ada, baik tanam-tanaman, buah-buahan, dan ternak yang orang-orang musyrik berbuat sekehendak hatinya terhadap ternak-ternak mereka berdasarkan pendapat-pendapat mereka.<sup>11</sup>

c. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku,”.<sup>12</sup>

Tafsir Ibnu Katsir dari ayat di atas yaitu Allah SWT berfirman dan ditujukan kepada orang-orang ahli kitab, “Dan dirikanlah shalat,” merupakan perintah Allah kepada mereka agar mereka shalat bersama Nabi SAW. FirmanNya, “Dan tunaikan zakat” merupakan perintah Allah kepada mereka untuk menunaikan zakat, yakni menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Firman Allah SWT, “Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk” merupakan perintah Allah kepada mereka agar melakukan rukuk (shalat) bersama orang yang rukuk (shalat) dari kalangan umat Muhammad SAW.<sup>13</sup>

Berdasarkan ayat-ayat di atas, menggambarkan bahwa perintah zakat merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan. Terdapat 27 ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan mengenai perintah zakat yang disejajarkan dengan perintah shalat. Dari kesejajaran tersebut dapat

<sup>11</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir: Kemudahan dari Allah*, Terjemahan dari Judul Asli Taisiru al-Aliyyul Qadir lil Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Jilid 1: Surah al-Fatihah – an-Nisaa, h.289.

<sup>12</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 43

<sup>13</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir: Kemudahan dari Allah*, Terjemahan dari Judul Asli Taisiru al-Aliyyul Qadir lil Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Jilid 2: Surah al-Maaidah – an-Nahl, h.278

dimaknai bahwa kewajiban zakat tidak kalah pentingnya dengan kewajiban sholat sebagai tiang agama dalam Islam.

## 2. Hadits Rasulullah SAW

Perintah kewajiban berzakat tertera pula pada hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Mu'adz Radhiallahu 'Anhu ke Negeri Yaman, Beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada Syahadat (persaksian) tiada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shodaqoh (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka". (HR. Bukhari)<sup>14</sup>

Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah SAW menyerukan perintah zakat pada umatnya yang pada saat itu ibadah zakat belum pernah dilaksanakan. Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk mengeluarkan zakat dari harta Muslim yang kaya bersamaan dengan perintah sholat. Zakat dapat diartikan sebagai ibadah yang sama urgensinya dengan sholat sebagai

<sup>14</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*, Terjemahan dari Judul Asli *Al-Jami ash-Shahih* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2002), h.711

tiang agama dan juga menjadi salah satu rukun Islam sebagai perintah Allah SWT.

### 3. Regulasi Pemerintah

- a. Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c. Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003;
- d. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
- e. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : Kw.08.3/BA.4/1142/2011 perihal Pelaksanaan Zakat Profesi;
- f. Surat Kepala Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : kd.08.010/2/pw.01/44 /2013 tanggal 01 Januari 2013 tentang Pembentukan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kota Metro Tahun 2013.<sup>15</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, regulasi hukum mengenai zakat di Indonesia perlu untuk senantiasa dikembangkan dan disempurnakan dengan dinamis. Legalitas zakat dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan antara publik dengan intuisi negara, dengan demikian kinerja zakat dapat lebih efektif dan optimal. Zakat yang dipayungi Pemerintah mampu mengembangkan ranah pembangunan ekonomi dan masa depan yang baik bagi zakat di Indonesia.

### C. Tujuan Zakat

Zakat memiliki tujuan yang sangat besar bagi umat Islam. Adapun yang menjadi tujuan zakat antara lain:

---

<sup>15</sup>Dokumentasi UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kementerian Agama Kota Metro, dikutip pada 29 September 2017

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnussabil*, dan *mustahiq* lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) di hari orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.<sup>16</sup>

Dengan zakat akan tercapai sebuah makna dan inti ibadah sebagai penyerahan diri kepada Allah SWT. Ketika seseorang berzakat ia telah melaksanakan perintah Allah dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan sehingga tercipta rasa damai dan tentram bagi umat. Berdasarkan tujuan zakat yang telah disebutkan di atas, manfaat zakat akan dapat dirasakan oleh semua pihak, yaitu yang mengeluarkan, yang mengelola, dan juga yang menerima. Sehingga manfaat itu dapat dirasakan secara menyeluruh dan yang demikian itulah dapat menjadi gambaran bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*.

#### **D. Sebab, Rukun dan Syarat Zakat**

Hal terpenting untuk menentukan seseorang terkena kewajiban berzakat adalah dengan mengetahui sebab, rukun dan syarat zakat. Adapun menurut ulama Hanafiyah, sebab zakat adalah kepemilikan sebesar satu

---

<sup>16</sup> Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), h. 27-28.



*nishab* yang berkembang atau diperkirakan akan berkembang selama satu tahun Hijriyah atau disebut *haul*.<sup>17</sup>

Selain sebab zakat, zakat juga memiliki rukun dan syarat yang wajib dipenuhi agar zakat yang dikeluarkan sah. Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya atau diserahkan kepada wakilnya; yaitu imam atau orang yang ditugaskan untuk memungut zakat.<sup>18</sup> Adapun syarat-syarat wajib dan sahnya zakat sebagai berikut:

Syarat-syarat Wajib	Syarat-syarat Sah
Merdeka dan kepemilikan sempurna	Niat berzakat
Beragama Islam	Berasal dari harta yang diwajibkan
<i>Baligh</i> berakal dan dewasa	Sudah jatuh kewajibannya
Harta berkembang	Memberikan kepada yang berhak
Mencapai 1 <i>nishab</i>	Menyerahkan kepemilikan
Sudah 1 tahun Hijriyah	
Tidak ada hutang	

(Sumber: Wahbah Az-Zuhayly 2008)

<sup>17</sup> Ai Nur Bayinah, *Bayar Pajak Lebih Murah: Cara Tepat dan Mudah Mengurangi Pajak dengan Zakat dan Sumbangan Keagamaan*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015), h.36

<sup>18</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat (Kajian berbagai Mazhab)*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2008), h .97.

### E. Waktu Dikeluarkannya Zakat

Para ulama *fiqh* bersepakat bahwa waktu yang tepat untuk membayar zakat adalah dilakukan langsung saat telah terpenuhinya syarat-syarat zakat dan berdosa jika mengakhirkannya.<sup>19</sup> Sebaliknya bagi para pengumpul zakat dilarang pula untuk mengakhirkan penyaluran zakat untuk diputar dan dikembangkan untuk kebutuhan organisasi tersebut. Sebab, pembayaran zakat bersifat wajib dibayarkan langsung.<sup>20</sup> Secara umum, terdapat dua waktu pelaksanaan zakat yang tepat menurut para ulama, yakni seperti pada tabel berikut :

Kategori	Jenis Harta	Waktu Pembayaran Zakat
Harta berkembang	Emas, perak, barang dagangan dan binatang ternak	Sekali dalam setahun
Penghasilan	Tanaman, buah-buahan, barang tambang	Setiap menghasilkan atau memperoleh penghasilan
Kondisi Spesifik	Zakat fitrah	Sebelum matahari terbenam pada malam idul fitri.

(Sumber: Wahbah Az-Zuhayly 2008)

### F. Macam-macam Zakat

Secara umum zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat *nafs* (jiwa) dan zakat *maal* (harta). Keduanya merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim sebagai wujud ketaqwaan kepada Allah dan rasa persaudaraan antar sesama muslim.

<sup>19</sup> Ai Nur Bayinah, *Bayar Pajak.*, h.37

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.38

## 1. Zakat *Nafs* (Jiwa)

Zakat *nafs* atau seringkali dikenal dengan zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas diri sendiri setiap individu muslim laki-laki maupun perempuan yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Menurut Yusuf Qardhawi, makna zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *fatur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan.<sup>21</sup>

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa Ramadhan.<sup>22</sup> Untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.<sup>23</sup>

Zakat fitrah dapat disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat terpercaya di Indonesia. Zakat fitrah dapat dikeluarkan sebelum waktu sholat idul fitri di hari-hari terakhir bulan suci ramadhan. Itulah dasar pokok yang membedakan zakat fitrah dengan sedekah-sedekah lainnya. Selanjutnya dalam menunaikan zakat fitrah diawali dengan membaca niat sebagai berikut: "*Nawaitu an uhrija zakat fitri anna wa 'an jami'i maa yalzamuni nafqu tuhun syiar a'an far dzolillahi ta'ala*". Artinya : " Saya niat mengeluarkan zakat atas diri saya dan atas sekalian yang saya

---

<sup>21</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, h.920.

<sup>22</sup> *Ibid*, h.921

<sup>23</sup> *Ibid*.

wajibkan memberi nafkah pada mereka secara syari'at, fardhu karena Allah ta'ala."<sup>24</sup>

#### **a. Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah**

Ibn Umar ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum kepada setiap kaum Muslimin yang merdeka atau hamba sahaya, besar atau kecil, laki-laki atau wanita, (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah).<sup>25</sup>

Berdasarkan hadits di atas, seluruh kaum Muslimin (laki-laki maupun perempuan) merdeka yang melihat matahari terbenam di akhir Ramadhan maka berlaku kewajiban zakat fitrah. Kelompok yang harus mengeluarkan zakat fitrah adalah:

- 1) Anak yang baru lahir
- 2) Nikah (yang menyebabkan adanya istri)
- 3) Kaya (berkecukupan)
- 4) Islam<sup>26</sup>

Adapun bagi umat muslim yang memenuhi syarat tersebut di atas maka diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah pada akhir Ramadhan tanpa terkecuali.

---

<sup>24</sup> Zakat Fitrah, <https://globalzakat.id/tentang/zakat-fitrah>, diakses pada 6 Oktober 2018

<sup>25</sup> Muhammad Shiddiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Shahih: Kumpulan Hadis tentang Wanita*, (Bandung: Hikmah Mizan Pustaka, 2009), h.107

<sup>26</sup> Gus Arifin, *Step by Step Puasa Ramadhan bagi Orang Sibuk*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h.26

## b. Syarat dan Rukun Zakat Fitrah

Adapun syarat wajib dilaksanakannya zakat fitrah antara lain yaitu:

- 1) Orang Islam. sedangkan bagi orang yang bukan islam tidak diwajibkan
- 2) Membayar zakat fitrah dilaksanakan setelah terbenamnya matahari dari bulan ramadhan sampai akhir bulan ramadan.
- 3) Memiliki harta yang berlebih dengan ketentuan kelebihan harta untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Sedangkan bagi yang kekurangan tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah.<sup>27</sup>

Selain syarat zakat fitrah, terdapat pula rukun zakat fitrah yang harus dipenuhi antara lain yaitu:

- 1) Niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah SWT
- 2) Terdapat pemberi zakat fitrah atau musakki
- 3) Terdapat penerima zakat fitrah atau mustahik
- 4) Terdapat makanan pokok yang dizakatkan
- 5) Besar zakat fitrah yang dikeluarkan sesuai agama islam<sup>28</sup>

## c. Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Yang berhak menerima zakat fitrah sama dengan yang berhak menerima zakat-zakat lain yaitu 8 (delapan) golongan *asnaf*, sesuai dengan firman Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf

<sup>27</sup> Hasbiyallah, *Fikih*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama), h.41

<sup>28</sup> *Ibid.*

*yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>29</sup>

Maksud dari ayat di atas yang berhak menerima zakat ialah antara lain:

- 1) Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) *Muallaf*: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Pada jalan Allah (*sabilillah*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>30</sup>

#### **d. Hikmah Zakat Fitrah**

Zakat fitrah memiliki hikmah dibaliknya apabila dikerjakan secara ikhlas dan sungguh-sungguh. Hikmah zakat fitrah terdiri dari tiga hal:

- 1) Pembersih dari kemudharatan yang menimpa diri
- 2) Menambal kekurangan puasa

---

<sup>29</sup> Q.S. At-Taubah (9): 60

<sup>30</sup> Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam.*, h.640

3) Menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan.<sup>31</sup>

Dengan hikmah syariat, zakat mencegah orang miskin meminta-meminta pada saat hari raya Idul Fitri. Si miskin akan merasa bahwa masyarakat tidak membiarkan urusannya, dan tidak melupakannya pada hari yang berbahagia dan agung itu.

## 2. Zakat *Maal* (Harta)

Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan zakat *maal* ( harta benda ) yaitu zakat yang di keluarkan dari harta benda tertentu misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan (biji - bijian), dan harta perniagaan.<sup>32</sup>

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat *maal* sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al - Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.<sup>33</sup>

Dalam mengeluarkan zakat *maal*, terdapat syarat harta yang wajib dizakati. Syarat tersebut apabila telah terpenuhi maka seseorang wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya.

---

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, h.926

<sup>32</sup> Zainuddin bin Muhammad Al - Ghazali Al - Malibari, Fath Al - Mu'in, (Bairut : Darul Al - Fikri,tt), h.34.

<sup>33</sup> Nurdin Muhd Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6

### a. Syarat Harta yang Wajib Dizakati

Adapun syarat harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya ialah antara lain:

- 1) Harta itu milik orang yang beragama Islam;
- 2) Harta itu adalah hak milik sepenuhnya seseorang;
- 3) Harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan;
- 4) Harta itu telah mencapai satu *nishab* (syarat perhitungan minimal suatu harta telah wajib untuk dizakati);
- 5) Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer;
- 6) Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang menanggung utang jatuh tempo yang dapat mengurangi nisbah minimal;
- 7) Khusus harta yang berupa emas, perak, peternakan, pertambangan dan perdagangan, maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun<sup>34</sup>

Bila harta seseorang mukmin sudah memenuhi syarat-syarat tersebut maka harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun jenis harta yang harus dizakati bermacam-macam pembagiannya. Berikut ini pembagian jenis zakat *maal*.

### b. Pembagian Zakat

Zakat *maal* (harta) terdiri dari emas dan perak, binatang, tumbuh –tumbuhan (buah – buahan dan biji – bijian), dan barang perniagaan.<sup>35</sup> Secara umum, pembagian zakat dapat dijelaskan seperti berikut ini:

#### 1) Zakat emas perak dan uang

Emas tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai dua puluh dinar. Jika emas telah mencapai dua puluh dinar dan *haul*,

---

<sup>34</sup> Gustian Djuanda, Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak penghasilan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), h. 17

<sup>35</sup> Hasbi Ash Shidqieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 9



wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % atau setengah dinar. Lebih dari dua puluh dinar juga wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 %.<sup>36</sup>

Perak tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai dua ratus dirham. Jika telah mencapai dua ratus dirham, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 %. Selebihnya juga dihitung dengan persentase seperti itu, baik sedikit maupun banyak.<sup>37</sup>

Batasan *nishab* emas dan perak tersebut di atas, ialah emas dan perak murni (24 karat), dengan demikian, apabila seseorang memiliki emas yang tidak murni, misalnya emas 18 karat, maka *nishab*nya harus disesuaikan dengan *nishab* emas yang murni (24 karat), yaitu dengan cara membandingkan harga jualnya, atau dengan bertanya kepada toko emas, atau ahli emas, tentang kadar emas yang ia miliki.<sup>38</sup>

Zakat uang, dikeluarkan pada harta seseorang (dalam bentuk uang) yang telah mencapai *nishab* emas atau perak yang senilai dengan uang yang dimilikinya.<sup>39</sup>

Zakat emas, perak dan uang merupakan harta pokok yang perlu diperhatikan perihal pengeluaran zakatnya sebab jika seorang mukmin melalaikannya, sama halnya telah melalaikan kewajiban sebagai umat Islam dengan tidak menjalankan perintah Allah SWT.

---

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Ahmad Shiddiq Thabrani, Dkk, ( Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h, 65

<sup>37</sup> *Ibid*, h.66

<sup>38</sup> <http://zakat.or.id/layanan-zakat/kalkulator-zakat/> diakses pada 6 Oktober 2017

<sup>39</sup> Abd. Aziz Muhammad Azzam dan Abd. Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, h. 360

## 2) Zakat Binatang

Para Ulama mensyaratkan empat hal dalam pengeluaran zakat untuk binatang ternak, dengan ketentuan zakat hewan ternak sebagai berikut:

- (a) Hewan tersebut digembalakan di padang rumput terbuka sepanjang tahun.
- (b) Hewan ternak tersebut dimaksudkan untuk diperoleh susunya
- (c) Dimiliki satu tahun penuh.
- (d) Mencapai *nishab*.<sup>40</sup>

### (a) Unta

Unta baik unta *Khurasany*, baik unta arab campuran masing-masing 2,5 dan tidak ada zakat terhadap unta yang kurang dari lima ekor, jantan dan betina.<sup>41</sup>

### (b) Sapi (Kerbau)

Zakat sapi (kerbau) tidak secara rinci dijelaskan oleh Rasulullah, karena itu terjadi perbedaan pendapat. Zakat sapi (kerbau) ditetapkan zakatnya berdasarkan sunnah dan *ijma'* (pendapat yang mashur).<sup>42</sup>

### (c) Kambing (domba)

Zakat kambing atau domba wajib dikeluarkan berdasarkan hadits dan *ijma'*, dalam hadits disebutkan yang

---

352 <sup>40</sup> Abd. Aziz Muhammad Azzam dan Abd. Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, h. 351-

<sup>41</sup> Hasbi Ash Shidqdieqy, *Pedoman Zakat*, h.136

<sup>42</sup> *Ibid*, h.137

artinya: zakat kambing (domba) bila sampai 40 ekor sampai 120 ekor, 1 ekor kambing. (HR Bukhori).<sup>43</sup>

### 3) Zakat Tumbuhan/Buah-buahan dan Perikanan

Semua ulama mazhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat tumbuh – tumbuhan/tanaman dan buah – buahan adalah seper sepuluh atau sepuluh persen (10 %), kalau tanaman dan buah – buahan tersebut disirami air hujan atau air dari sungai. Tapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen (5%).<sup>44</sup>

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis. Syarat-syarat pelaksanaan zakat pertanian:

- (a) Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib dizakati.
- (b) Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat disimpan, dan jika disimpan tidak rusak.
- (c) Sudah mencapai *nishab*.<sup>45</sup>

Kadar zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan:

- (a) Hasil perairan yang diairi dengan menggunakan tenaga hewan/manusia/mesin yang mengangkut air dari sungai, atau sumur, maka zakatnya adalah 5%

---

<sup>43</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2008), h. 31

<sup>44</sup> Muhammad Mughniyyah Al – Jwad, *Al – Fiqh ‘Ala al - Madzahib Al – Khamsah*, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 186

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 370

- (b) Hasil pertanian yang diairi dengan irigasi alami atau air hujan zakatnya adalah 10%, sebab tidak menanggung beban kelelahan maupun biaya pengairan.
- (c) Hasil pertanian yang tanahnya diairi dengan mesin penyedot dan penyiram air atau dengan menggunakan tenaga hewan/manusia/mesin, maka zakatnya 5%.<sup>46</sup>

Pada zakat hasil perkebunan yaitu hasil bumi dan buah-buahan, ketentuannya adalah sebagai berikut:

- (a) Jika tanaman atau buah-buahan yang dihasilkan dari tanah sewaan, maka zakatnya wajib dibayar oleh pemilik tanah, bukan oleh penyewa, setelah mencapai *haul* dan digabungkan dengan harta yang lain, dikeluarkan zakatnya 2,5%.
- (b) Jika tanaman dan buah-buahan itu dihasilkan dari kontrak *muzara'ah* atau *musaqah*, maka zakatnya diwajibkan atas kedua belah pihak sesuai dengan presentasi masing-masing, setelah mencapai *nishab*.<sup>47</sup>

Perhitungan *nishab*, kadar dan waktu hasil pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 750 kg. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan/sungai/mata air, maka kadar zakatnya 10%, apabila diairi dengan disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.<sup>48</sup>

Pada zakat hasil perikanan, dicontohkan dengan seorang nelayan yang menangkap ikan di laut, kemudian dijual, maka seperti zakat niaga, wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2 ½%.<sup>49</sup>

#### 4) Hasil perdagangan dan perusahaan

Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat RI “Setiap perputaran uang atau modal dengan tujuan mencari keuntungan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 373

<sup>47</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Petunjuk Pelaksanaan*., h. 35

<sup>48</sup> *Ibid*.

<sup>49</sup> *Ibid*.

seperti mendirikan pabrik, mendirikan rumah untuk diperjualbelikan atau untuk dikontrakkan, rental mobil/motor, usaha taksi, usaha sembako, dan lain-lain termasuk *tijarah/niaga/dagang*”.<sup>50</sup> Adapun harta kekayaan hasil perdagangan tersebut wajib dizakati dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Berjalan 1 tahun (*haul*),
- (b) *Nishab* zakat perdagangan sama dengan *nishab* emas yaitu senilai 85 gram emas
- (c) Kadarnya sebesar 2,5%
- (d) Dapat dibayar dengan uang atau barang
- (e) Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan<sup>51</sup>

Perhitungan = (Modal diputar + Keuntungan + Piutang yang dapat dicairkan) – (Utang + Kerugian) x 2,5%.<sup>52</sup>

Pada zakat perusahaan dikeluarkan zakatnya dapat dengan memilih di antara 2 (dua) cara :

- (1) Pada perhitungan tutup akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti taksi, kapal, hotel, dll, kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%.
- (2) Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini di*qiyaskan* dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Petunjuk Pelaksanaan.*, h. 31

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 32

### c. Hikmah Zakat *Maal*

Zakat sebagai lembaga Islam juga mengandung hikmah (makna yang dalam atau manfaat) yang bersifat rohaniyah dan filosofis. Hikmah tersebut antara lain:

- 1) Zakat *maal* melatih si pemberi berderma dan bermurah hati
- 2) Zakat *maal* memperkuat hubungan cinta dan persaudaraan antara si pemberi dan orang lain;
- 3) Zakat *maal* memelihara adanya taraf hidup yang cukup bagi warga masyarakat;
- 4) Zakat *maal* menghilangkan faktor - faktor dan sebab - sebab pengangguran.;
- 5) Zakat *maal* adalah satu - satunya jalan untuk membersihkan hati manusia dari dengki, iri, dan dendam.<sup>54</sup>

### G. Model Distribusi Zakat

Dalam kenyataan yang terjadi saat ini di Indonesia, zakat yang diterima oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat tidak signifikan dengan jumlah penduduk muslim yang ada. Kecilnya penerimaan zakat oleh Amil Zakat bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan agama masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Masyarakat cenderung menyalurkan zakat secara langsung kepada orang yang menurut mereka berhak menerimanya. Sehingga tujuan dari zakat sebagai dana pengembangan ekonomi tidak terwujud, tetapi tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer.

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq*.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Mustafa Al-Khin, *Al Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy Syafi'i*, (Semarang: Asy Syifa', 2008), h, 6

1. Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah *muzakki*) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
2. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
  - a. Bila zakat yang dihasilkan banyak seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
  - b. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan zakat yang telah ditetapkan.
  - c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
  - d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
  - e. Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'i sebagai kebijakan umum dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya.
3. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si

---

<sup>55</sup> Dewi Laela Khilyatin. "Teori Umum Tentang Manajemen Zakat". <http://pondok-darussalam.blogspot.com>. Diakses pada 6 Oktober 2017.

penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>56</sup>

Dalam kaitan hal tersebut, agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Mekanisme distribusi zakat kepada mustahiq bersifat konsumtif dan juga produktif. Menurut Mufraini distribusi zakat tidak hanya dengan dua cara akan tetapi tiga yaitu: distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi.<sup>57</sup> Berikut akan dijelaskan mengenai pola pendistribusian tersebut:

### **1. Distribusi Zakat Konsumtif**

Dalam distribusi konsumtif ini dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu tradisional dan kreatif.

#### **a. Tradisional**

Zakat dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Misalnya pembagian zakat fitrah berupa uang dan beras kepada fakir miskin setiap idul fitri. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Arief Mufraini, *Akuntansi & Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 154.

<sup>58</sup> Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), h.314



## b. Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula.<sup>59</sup> Misalnya diberikan dalam bentuk beasiswa untuk pelajar.

Pola pendistribusian dana zakat secara konsumtif diarahkan kepada:

- 1) Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para *mustahiq*.
- 2) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis.
- 3) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan SDM agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia.<sup>60</sup>

Maksud dari pengarahannya zakat konsumtif tersebut yaitu *pertama*, sama halnya dengan pola distribusi konsumtif tradisional yang realisasinya tidak jauh pada pemenuhan sembako bagi kelompok delapan *asnaf*. *Kedua*, Zakat ini diarahkan kepada pendistribusian konsumtif non makanan, walaupun untuk keperluan konsumtif *mustahiq*. Misalnya untuk peningkatan kesejahteraan sosial yaitu pengupayaan renovasi tempat-tempat pemukiman. Sedangkan untuk kesejahteraan psikologis adalah dengan Lembaga Zakat menyalurkan dalam bentuk bantuan pembiayaan. Misal nikah massal, sunat massal bagi anak-anak *mustahiq*. *Ketiga*, upaya pemenuhan kebutuhan yang

---

<sup>59</sup> Amiruddin, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.3.

<sup>60</sup> *Ibid*.

berkaitan dengan peningkatan SDM agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia.

Peningkatan kualitas pendidikan *mustahiq*. Baik berupa beasiswa sekolah pelatihan-pelatihan dan peningkatan keterampilan non formal, yang dapat dimanfaatkan untuk kelanjutan menjalani kehidupan dan menggapai kesejahteraan

## 2. Distribusi Zakat Produktif

Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat *statement* syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari *mustahiq* delapan *asnaf*. Konsep distribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat biasanya dipadukan dengan dana lain yang terkumpul, misal *infaq* dan *shadaqah*.

Zakat produktif memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.<sup>61</sup>

Pendistribusian zakat produktif adalah pendistribusian zakat dimana *mustahiq* tidak menerima zakat secara langsung untuk dikonsumsi, akan tetapi diusahakan terlebih dahulu baik oleh *mustahiq*

---

<sup>61</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 64.

sendiri maupun oleh lembaga atau badan amil, adapun yang dikonsumsi adalah hasil dari pengembangan zakat yang diusahakan tersebut.<sup>62</sup>

Penyaluran zakat secara produktif pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW seperti yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.<sup>63</sup>

Sama halnya dengan zakat konsumtif, pendistribusian zakat produktif diklarifikasikan menjadi dua macam:

#### **a. Tradisional**

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha. Misalnya pembelian bantuan ternak kambing, sapi.<sup>64</sup>

#### **b. Kreatif**

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk

---

<sup>62</sup> Fakhrur, “*Zakat Produktif di Kota Malang Studi tentang Respon Mustahiq terhadap Zakat Kredit Perspektif Behaviorisme*”, (Disertasi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), h.9

<sup>63</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 133.

<sup>64</sup> *Ibid.*h.5

membantu pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.<sup>65</sup>

Dalam kaitan dengan penyaluran zakat yang bersifat produktif, ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi, dalam bukunya yang fenomenal, yaitu *Fiqh Zakat*, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Dan untuk saat ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.<sup>66</sup>

BAZ ataupun LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq dalam kegiatan usahanya, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamannya.<sup>67</sup>

Selain sebagai modal usaha, penyaluran zakat produktif juga dapat berupa penyediaan sarana kesehatan gratis dan sekolah gratis untuk

---

<sup>65</sup> Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Depok: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h.35

<sup>66</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, h.733

<sup>67</sup> Susilo Ady Saputro. "*Zakat Produktif Sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan di Indonesia*" <http://anakbanyumas.wordpress.com>. diakses pada 6 Oktober 2017

anak keluarga miskin. Tetapi sekali lagi, pendekatan keluarga miskin ini harus dilakukan dengan ketat agar zakat tidak terdistribusi kepada golongan yang tidak berhak.

Adapun langkah-langkah pendistribusian zakat produktif tersebut sebagai berikut:

- 1) Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
- 2) Pengelompokan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia dan kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
- 3) Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.
- 4) Pemberian dana, dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.<sup>68</sup>

Zakat pada kondisi saat ini sudah seharusnya tidak hanya diterapkan dalam pola konsumtif. Zakat memiliki potensi sebagai sumber dana bagi umat. Sehingga pola konsumtif dapat dijadikan opsi sebagai sumber dana darurat bagi masyarakat, selebihnya pola produktif mampu membangun masyarakat menjadi lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam aktivitas ekonomi.

---

<sup>68 68</sup> Arief Mufraini, *Akuntansi & Manajemen.*, h.177-178.

### 3. Tinjauan Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah *isim masdar* dari kata *zakayazku-zakah* oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.<sup>69</sup> Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa inggris yaitu "*produktive*" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.<sup>70</sup> Jadi dapat dijelaskan bahwa zakat produktif merupakan penyaluran zakat yang dapat menciptakan *mustahiq* untuk dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dari harta zakat yang telah diterimanya. Sehingga mampu memberi ketahanan ekonomi dalam jangka waktu yang lebih panjang.

#### a. Dasar Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat dikembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

"خُذْهُ فْتَمَوِّلْهُ، أَوْ تَصْضُدِّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا  
الْمَلِّ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا  
تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau

<sup>69</sup> Fahrudin, Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1, hlm. 13

<sup>70</sup> Joyce M. Hawkins, Kamus Dwi Bahasa InggrisIndonesia, Indonesia-Inggris, Exford: Erlangga, 1996, hlm. 267

*mintanya, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu''*. HR Muslim.<sup>71</sup>

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Kalimat **فَتَمَوَّلْهُ** (*fatamawalhu*) berarti mengembangkan dan mengusahakannya sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.<sup>72</sup>

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat tidak hanya dikelola secara tradisional sesuai dengan aturan asalnya, tetapi dapat didayagunakan dalam bentuk-bentuk yang inovatif. Contohnya antara lain:

- 1) Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
- 2) Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
- 3) Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.

---

<sup>71</sup> Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*. hlm. 588

<sup>72</sup> *Ibid*, h.86

- 4) Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil-hasil laut serta madu.
- 5) Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.
- 6) Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.<sup>73</sup>

Pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha yang digunakan oleh fakir dan miskin (*mustahiq*), banyak ditanyakan oleh umat Islam Indonesia; oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status pengelolaan dana zakat tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. Dalam kaitan zakat produktif yang diimplementasikan dalam bentuk penyaluran pinjaman modal usaha, disandarkan pada dasar hukum Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar*.

Zakat yang di-*ta'khir*-kan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*).
- 2) Diinvestasikan pada bidangbidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
- 3) Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
- 4) Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah).
- 5) Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
- 6) Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
- 7) Pembagian zakat yang di-*ta'khir*-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 22



## b. Pendayagunaan Zakat Produktif

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (*profitable*), mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahik zakat dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif.<sup>75</sup>

Pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.<sup>76</sup>

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- 5) Melakukan evaluasi
- 6) Membuat laporan<sup>77</sup>

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi

---

<sup>74</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar*.

<sup>75</sup> Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran*., hlm. 24

<sup>76</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>77</sup> *Pendayagunaan Zakat Produktif*, <https://diglib.uinsby.ac.id>, diakses pada 06 Oktober

sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Adapun yang menjadi kelemahan orang miskin yang paling utama tidak melulu hanya mengenai persoalan permodalan, akan tetapi lebih kepada mental, sikap dan manajemen usaha. Oleh karena itu, sangat besar peranan zakat produktif yang harus memupuk mental usaha *mustahiq* agar tercipta kesadaran yang tinggi untuk berubah ke arah yang lebih baik, hal ini yang dimaksud dengan peran pemberdayaan. Dalam jangka panjang, zakat yang dihimpun harus mampu memberdayakan *mustahiq* sampai pada titik pengembangan usaha. Program-program konsumtif dapat dijadikan stimulan dalam jangka pendek, sementara program-program produktif harus lebih diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *mustahiq* tidak selamanya tergantung kepada amil.

### c. Penyaluran Zakat Produktif dalam Bentuk Modal Usaha

Lembaga zakat tak sekadar menyalurkan dana untuk program sosial. Lembaga zakat juga menstimulus kegiatan ekonomi berupa kegiatan kewirausahaan agar para *mustahik* bisa mandiri. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang hukum investasi dana zakat. Dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003, zakat yang ditanggihkan boleh diinvestasikan (*istismar*) dengan beberapa syarat yang

ketat. Zakat ditangguhkan (*ta'khir*), yakni zakat yang penyalurannya ditangguhkan oleh lembaga zakat atau *muzaki* menangguhkan pembayaran ke lembaga zakat.<sup>78</sup>

Zakat ditangguhkan bisa diterima sepanjang belum ada *mustahiq* dan ada kemaslahatan lebih besar berdasarkan penilaian lembaga zakat atau *muzakki*. MUI lantas mencantumkan persyaratan zakat yang di-*ta'khir*-kan bisa diinvestasikan. Pertama, dana zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku. Kedua, diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini dapat memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. Ketiga, dibina dan diawasi pihak-pihak berkompeten.<sup>79</sup>

Alquran dan hadist tidak menyebutkan secara rinci dan detail tentang sistem atau cara penyaluran zakat. Hanya saja ulama' mencoba mengambil *istinbath* dari sejumlah *nash* (teks) Alquran dan hadis tentang cara tersebut. Dari sejumlah literature klasik, hampir tidak ditemukan pembahasan tentang penyaluran zakat dengan cara meminjamkan atau *Al Qordhul Hasan*. Namun hal tersebut tidak serta merta menunjukkan tidak boleh.<sup>80</sup>

Sejumlah ulama' kontemporer membolehkan penyaluran zakat dalam bentuk pinjaman atau *Al Qordhul Hasan*. Mereka antara lain: Syekh

---

<sup>78</sup> A Syalaby Ichsan, *Bolehkah Dana Zakat Diinvestasikan*, <http://www.republika.co.id>, diakses pada 10 Mei 2018

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Yusuf Siddik, Dewan Syariah LAZNAS BSM Jakarta, *Dialog Ramadhan LAZNAS BSM: Apakah Boleh Dana Zakat Disalurkan dengan Pinjaman?*, [www.ramadhansindonews.com](http://www.ramadhansindonews.com), diakses pada 10 Mei 2018

Abu Zahroh, Kholaf, Hasan Khan, DR Muhammad Humaidullah Al Haidar Abadi, DR Syauqi Ismail Syihatah, DR Yusuf Qordhowi dan sejumlah ulama' lainnya. Dalil mereka adalah *Qiyas*, atau *Qiyas Jali*. *Qiyas Jali* dinamakan juga dengan *Qiyas min Babi Aula*, yaitu menganalogikan hukum yang belum ada dalilnya secara tekstual dengan hukum yang sudah ada dalilnya dari Alquran atau Sunah atau Ijma', di mana hukum yang belum ada dalilnya justru lebih utama atau lebih kuat dibandingkan hukum yang sudah ada dalilnya.<sup>81</sup>

Dalam konteks penyaluran zakat melalui sistem pinjaman (*Al Qordhul Hasan*). Jika seandainya orang miskin boleh diberikan cuma-cuma dana zakat untuk mengangkat statusnya dari *mustahiq* menjadi *muzakki*, maka jika tujuan tersebut dapat tercapai hanya dengan memberikan pinjaman maka itu jelas lebih dibolehkan.<sup>82</sup> Jika dana zakat dapat diberikan kepada satu orang, maka jika dana yang sama dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu orang lebih dibolehkan. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairoh, Rasulullah SAW bersabda:

طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ, وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

Artinya: “Makanan dua orang (lebih baik) jika mencukupi tiga orang, dan makanan 3 orang (lebih baik) jika mencukupi empat orang”. (HR Turmudzi).<sup>83</sup>

Dr Syauqi Ismail Syihatah, Anggota Dewan Syariah Internasional untuk Zakat, dalam bukunya “*Tandzim wa Muhaabatuz Zakaah fit Tathbiqil Mu’aashir*” (Manajemen Zakat Modern) menyebutkan: “Bahwa jika seorang yang berhutang (*ghorimin*) boleh diberikan dana zakat untuk membayarkan hutangnya kepada lembaga (perbankan) lain, maka jika ia diberikan pinjaman dari dana zakat lebih dibolehkan untuk diberikan, mengingat uang pinjaman tersebut, akan kembali lagi ke lembaga zakat.”<sup>84</sup>

Di samping itu, menyalurkan dana zakat melalui pinjaman tanpa bunga (*Al Qordhul Hasan*) membantu dalam proses penerapan sistem pinjaman non ribawi yang diinginkan Islam. Hal ini tentunya dapat dikategorikan dalam *asnaf Fi Sabilillah* yaitu upaya menjaga dan melestarikan ajaran Islam di kalangan umat Islam.

Namun yang dibolehkan menerapkan sistem pinjaman ini hanyalah lembaga zakat. *Muzakki* tidak dibenarkan meminjamkan zakat yang harus ia keluarkan. Karena kewajibannya adalah mengeluarkan zakat tersebut dan menyerahkannya kepada lembaga zakat. Sementara lembaga zakat,

---

<sup>83</sup> HR Turmudzi, Kitab Ath’imah (makanan), bab makanan satu orang cukup untuk dua orang, jilid 4 hal. 235-236.

<sup>84</sup> Syauqi Ismail Syihatah, *Manajemen Zakat Modern*, Terjemahan dari judul asli *Tandzim wa Muhaabatuz Zakaah fit Tathbiqil Mu’aashir*, h.297

dibolehkan menyalurkan dana zakat tersebut dengan sistem pinjaman dengan syarat:

- 8) Dana zakat yang dipinjamkan tersebut bukan untuk kebutuhan konsumsi (*istihlaki*), seperti menutupi kebutuhan pangan, biaya pengobatan dan biaya sekolah, melainkan untuk investasi atau modal usaha yang diharapkan akan memberikan keuntungan dan memotivasi si peminjam untuk mendapat keuntungan yang sebanyak mungkin agar mampu mengembalikan pinjamannya.
- 9) Jika si peminjam ternyata tidak mampu melunasi pinjamannya, maka yang bersangkutan harus dibebaskan dari kewajibannya mengembalikan pinjaman tersebut.<sup>85</sup>

Yusuf Al-Qardawi berpendapat, “Berdasarkan madzhab yang paling sahih, bisa dikatakan bahwa lembaga zakat boleh menginvestasikan dana zakat yang diterima secara melimpah dalam bentuk apapun seperti ruko dan yang sejenisnya. Hasil yang didapat dari investasi tersebut bisa disalurkan kepada para mustahik secara periodik. Bentuk investasi dana zakat itu tidak boleh dijual dan dialihkan kepemilikannya sehingga menjadi bentuk setengah wakaf.”<sup>86</sup> Menurut jumhur, alasan pembolehan investasi dana zakat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Nabi dan para khulafaur rasyidin pernah menginvestasikan dana-dana zakat berupa onta dan kambing. Berdasarkan riwayat Anas bin Malik, Nabi pernah meminum susu dari hewan-hewan ternak zakat di

---

<sup>85</sup> Yusuf Siddik, Dewan Syariah LAZNAS BSM Jakarta, *Dialog Ramadhan LAZNAS BSM: Apakah Boleh Dana Zakat Disalurkan dengan Pinjaman?*, [www.ramadhansindonews.com](http://www.ramadhansindonews.com), diakses pada 10 Mei 2018

<sup>86</sup> Yusuf Qardawi, *Atsar al-Zakat lil afrad wa al-mujtamaat*, paper dalam seminar Zakat I tahun 1984

Madinah yang kesemuanya itu ditempatkan di tempat peternakan khusus dengan diurus para pengembala yang digaji sehingga peternakan tersebut menghasilkan pengembangan ternak secara signifikan (HR Bukhari). Pendapat yang mengatakan bahwa pembayaran zakat itu harus segera, itu berlaku bagi *muzakki*, bukan imam atau lembaga pengelolanya.

- 2) Perluasan arti “*fi sabilillah*” yang diartikan segala bentuk kebaikan seperti membangun benteng, merenovasi masjid, membangun pabrik dan lain-lain.<sup>87</sup> Jika pengalokasian dana zakat dalam bentuk kebaikan apapun, maka investasi dalam bentuk perdagangan dan pabrik tentu lebih utama karena bisa mendatangkan keuntungan bagi para mustahik itu sendiri. Hal ini diperkuat oleh pendapat al-Nawawi yang menyatakan bahwa imam boleh menyalurkan dana zakat secara langsung atau tidak langsung melalui penyewaan atau investasi bentuk apapun.<sup>88</sup>
- 3) Hadits-hadits tentang anjuran bekerja dan menginvestasikan property apapun yang dimiliki seseorang, seperti dalam hadits riwayat Anas dalam sunan Abu Daud.
- 4) Meng*qiyaskan* kepada bolehnya menginvestasikan harta anak yatim oleh para walinya, sebagaimana sabda nabi, “Carilah keuntungan dari harta anak yatim yang tidak akan ada kewajiban sedekah atasnya”. (HR al-Baihaqi).
- 5) Berpijak pada konsep *istihsan*, maka kendati secara eksplisit tidak ditemukan anjuran investasi secara langsung, tetapi adanya situasi dan kebutuhan modern saat ini, maka investasi dana zakat ini sangat bermanfaat terutama bagi para *mustahiq*. Nampak sekali adanya aspek kemaslahatan yang besar jika dana zakat bisa dikelola melalui investasi yang cerdas.<sup>89</sup>

Zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha dengan demikian diperbolehkan dalam Islam. Sebab pendayagunaan dan pengelolaan secara inovatif dengan mengikuti kebutuhan zaman diperbolehkan selama dapat menghasilkan kemaslahatan terlebih lagi jika manfaat yang diperoleh akan menjadi lebih luas kepada seluruh lapisan umat. Namun, implementasi yang dilakukan tentunya tetap dalam lini yang ditetapkan oleh syariat

---

<sup>87</sup> Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Rozi, *Tafsir Fakhr Ar-Rozi/Mafatihul Ghoib/Tafsir Al-Kabir*, (Beirut: Darul Fikr, 1981) h.115.

<sup>88</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h.160

<sup>89</sup> LMI Zakat, *Hukum Menginvestasikan Dana Zakat*, <https://lmikabprobolingo.wordpress.com>, diakses pada 10 Mei 2018

dengan berpedoman pada Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Fatwa ulama mengenai zakat produktif.

## **H. Organisasi Pengelola Zakat**

### **1. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat**

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.<sup>90</sup> Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>91</sup>

#### **a. Fungsi Organisasi Pengelola Zakat**

Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni:

##### **1) Sebagai perantara keuangan**

Amil berperan menghubungkan antara pihak Muzakki dengan Mustahiq. Sebagai perantara keuangan Amil dituntut menerapkan azas trust(kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

##### **2) Pemberdayaan**

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat *Muzakki*

---

<sup>90</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Lembaga Keuangan Publik Islam*, Modul Mata Kuliah, (Yogyakarta: FIAI UII, 2006), h.2

<sup>91</sup> Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat



menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat Mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *Muzakki* baru.<sup>92</sup>

Lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar tersalurkan oleh para *mustahiq* dan memiliki nilai manfaat bagi *mustahiq* tersebut. Selain itu, seluruh anggota organisasi pengelola zakat telah memahami dengan baik syariat dan seluk-beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap berada dalam hukum islam dan tentunya hal ini harus sejalan dengan asas-asas pengelolaan zakat.

## **2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)**

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.<sup>93</sup>

BAZNAS menjalankan empat fungsi yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

---

<sup>92</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.207-208

<sup>93</sup> Pusat Badan Amil Zakat Nasional, *Profil BAZNAS*, <http://pusat.baznas.go.id>, diakses pada 6 Oktober 2017

- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>94</sup>

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- a. Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.<sup>95</sup>

LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah inti dari pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemashlahatan umat Islam.<sup>96</sup>

Lembaga Amil Zakat (LAZ) ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.<sup>97</sup>

Adapun syarat-syarat dapat didirikannya LAZNAS adalah sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum;
- b. Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*;
- c. Memiliki program kerja;
- d. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.<sup>98</sup>

BAZNAS sebagai lembaga nonstruktural harus bisa menjadi kordinator bagi lembaga amil zakat lainnya, agar mampu kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Kompasiana, *Apa Itu BAZ dan LAZ, Bagaimana Perilaku Pemerintah Terhadap BAZ dan LAZ*, <http://kompasiana.com>, diakses pada 6 Oktober 2017

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam menyejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya mampu berkordinasi dengan seluruh lembaga amil zakat yang ada. Tanpa adanya kordinasi antar lembaga amil zakat, akan menyebabkan tidak terserapnya seluruh potensi zakat Indonesia. Hal itu terbukti dengan masih tidak maksimalnya pembayaran zakat karena tersebar di banyak tempat.

## **I. Teori Kesejahteraan**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.<sup>99</sup> Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya, rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan kesejahteraan yang masih rendah.<sup>100</sup>

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang

---

<sup>99</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, *Berita Resmi Statistik*, No. 08/07/18/TH.IX, 17 Juli 2017

<sup>100</sup> *Ibid.*

dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>101</sup>

Sejahtera berarti aman sentosa makmur, atau selamat, artinya terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran. Dalam artian yang luas kesejahteraan juga bisa dikatakan sebagai rasa aman dan tidak terganggu dari hal apapun.<sup>102</sup>

Dibawah ini beberapa pengertian kesejahteraan menurut para ahli:

a. Arthur Dunham

Kesejahteraan sosial merupakan kegiatan-kegiatan sosial yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian melalui orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial.<sup>103</sup>

b. Umar Chapra

Menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat

---

<sup>101</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2.

<sup>102</sup> Fadhil Nurdin, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Angkasa, 1990),

<sup>103</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 28

(*al-hayah al-tayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.<sup>104</sup>

Dari definisi kesejahteraan masyarakat diatas, maka dapat dijelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, baik dalam dimensi material maupun spiritual.

Kesejahteraan merupakan impian semua orang dalam hidupnya. Kesejahteraan berarti suatu tujuan manusia untuk kehidupan yang lebih baik. Kesejahteraan erat kaitannya dengan sosial, karena kesejahteraan merupakan tujuan makhluk sosial.<sup>105</sup> Kemakmuran atau kesejahteraan merupakan tujuan manusia yang utama.<sup>106</sup>

Kesejahteraan pada hakikatnya bernilai subjektif, bergantung pada pandangan hidup dan pola pikir individu. Namun hanya pandangan hidup dan pola pikir yang benar, yang dapat membawa seseorang menuju kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang tidak hanya terbatas duniawi namun sampai pada kesejahteraan akhirat.

## 2. Indikator Kesejahteraan menurut BPS

Menurut BPS indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran

---

<sup>104</sup> M. B. Hendrie Anto. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, h. 7

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Minto Purwo S. dkk., *Pelajaran Ekonomi*, (Jakarta:Yudistira, 2000), h.17.

keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.<sup>107</sup> Kedelapan indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- 1) Tinggi (> Rp. 10.000.000)
- 2) Sedang (Rp. 5.000.000)
- 3) Rendah (< Rp. 5.000.000) <sup>108</sup>

b. Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- 1) Tinggi (> Rp. 5.000.000)
- 2) Sedang (Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000)
- 3) Rendah (< Rp. 1.000.000) <sup>109</sup>

c. Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- 1) Permanen

Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai.

Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari

<sup>107</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Indikator Kesehatan Rakyat Welfare Indicators*, 2015,

<sup>108</sup> *Ibid*, h. 4

<sup>109</sup> *Ibid*.

ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes

2) Semi Permanen

Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes.

3) Non Permanen

Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya<sup>110</sup>

d. Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

1) Lengkap

2) Cukup

3) Kurang <sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid*, h.5

e. Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- 1) Bagus (< 25% sering sakit)
- 2) Cukup (25% - 50% sering sakit)
- 3) Kurang (> 50% sering sakit) <sup>112</sup>

e. Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- 1) Mudah
- 2) Cukup
- 3) Sulit <sup>113</sup>

g. Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- 1) Mudah
- 2) Cukup
- 3) Sulit <sup>114</sup>

h. Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan

---

<sup>112</sup> *Ibid*, h.6

<sup>113</sup> *Ibid*.

<sup>114</sup> *Ibid*.



kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- 1) Mudah
- 2) Cukup
- 3) Sulit <sup>115</sup>

Dari indikator-indikator di atas maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia yang lebih tinggi. Indikator-indikator yang terus dikembangkan diharapkan dapat membawa korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Oleh karena itu pembangunan haruslah diorientasikan pada seluruh asset bangsa, dan hasil dari pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

### **3. Kesejahteraan dalam Islam**

Para Fuqaha sepakat bahwasanya kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syariah, pandangan ini dalam konsep ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui penghapusan kesulitan dan ketidaknyamanan serta meningkatkan kualitas kehidupan secara material dan spiritual.<sup>116</sup>

Kesejahteraan sesungguhnya adalah kehendak utama dalam Islam dan siapa pun harus memperolehnya, terlebih mereka yang terpinggirkan.

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> M. Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Agama Insani press, Jakarta, 2000, h. 2-3

Sejak Indonesia merdeka, salah satu tujuan utama pendirian negara ini adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.<sup>117</sup> Cita-cita mulia ini masih terus diupayakan untuk direalisasikan agar tujuan ini dapat dinikmati oleh segenap bangsa Indonesia.

Kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari ruh Islam itu sendiri sebagai misi Rasulullah SAW, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

*Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*<sup>118</sup>

Ayat tersebut menjadi gambaran bahwa Allah SWT memerintahkan bagi manusia untuk sebuah kehidupan yang penuh dengan kemakmuran dan kasih sayang sesama umat. Semua manusia berhak untuk memperoleh kesejahteraan keadilan dan kemakmuran, oleh karena itu kesejahteraan harus diperjuangkan.

Kesejahteraan dan kemakmuran dapat diperoleh dengan cara mencari karunia Allah di dunia maupun di akhirat. Allah SWT berfirman:

---

<sup>117</sup> Arief Subhan dkk., *SKJ: Islam untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.2

<sup>118</sup> Q.S. Al-Anbiyaa (21): 107

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”<sup>119</sup>

Kebahagiaan hidup di akhirat memang merupakan tujuan bagi setiap umat, namun kehidupan dunia tidak boleh dilupakan agar jalan menuju kehidupan akhirat tersebut dapat dicapai dengan baik tanpa gangguan ekonomi, misalnya karena kekurangan pangan.<sup>120</sup> Secara tegas Allah SWT menganjurkan hal ini sebagaimana firmanNya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>121</sup>

Tidak ada jalan lain untuk mencapai kesejahteraan tanpa adanya kerja keras. Hubungan antara kerja keras dan perintah zakat amatlah

<sup>119</sup> Q.S. Al-Qashsash (28): 77

<sup>120</sup> LM. Harafah, *Ekonomi dan Bisnis Islam, Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 401.

<sup>121</sup> Q.S. Al-Jum'ah (62): 10

dekat. Pada hakikatnya, perintah zakat itu mengisyaratkan mengenai perintah kerja keras. Karena sebelum kita dapat menunaikan zakat, kita harus bekerja keras terlebih dahulu untuk mendapat harta kekayaan yang mencapai *nishab*.<sup>122</sup>

Dalam konsep ekonomi islam, terdapat satu titik awal yang perlu di perhatikan, yang mana ekonomi Islam sesungguhnya bermuara pada *Aqidah Islamiah* yang bersumber dari ketetapan-ketetapan Allah yang bepedoman pada Al qur`an dan Al hadits. Menurut M.Umar Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu merealisasikan kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada pada koridor yang mengacu pada ajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu dan tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.<sup>123</sup>

Secara umum, kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat dapat terjadi bila semua lapisan dalam masyarakat tersebut sudah bisa menikmati kehidupan yang layak. Tidak ada lagi kesenjangan besar di antara golongan-golongan tertentu.<sup>124</sup> Dalam artian golongan kaya menyisihkan hartanya untuk golongan yang miskin. Anjuran ini mengisyaratkan bahwa dengan adanya perguliran harta dari yang kaya

---

<sup>122</sup> LM. Harafah, *Ekonomi dan..*, h.401

<sup>123</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan teoritis*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 1

<sup>124</sup> *Ibid*, h.402

kepada yang miskin akan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Imam Al-Ghazalli menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: agama, Jiwa, akal, keluarga, dan keturuna, harta atau kekayaan. Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar itu dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu:<sup>125</sup>

- a. Kebutuhan-kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Kebutuhan skunder yang terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam hidup.
- c. Kebutuhan tersier mencakup kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, menerangi, dan menghibur hidup.

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian Al Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar demikian cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat dan dapat mencakup bahkan kebutuhan-kebutuhan

---

<sup>125</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, h. 62

sosio psikologis. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, terapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup, kelompok ketiga mencakup kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari skunder. Kenyamanan saja yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, menerangi dan menghiasi hidup.<sup>126</sup>

Kebahagiaan masyarakat yang didambakan dalam Al-Qur`an tercermin dari surga yang huni oleh Adam dan Istrinya, sesaat sebelum mereka melaksanakan tugas kekhalfahan di bumi. Seperti telah diketahui, sebelum Adam dan Istrinya turun ke bumi mereka terlebih dahulu ditempatkan di surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu diwujudkan di bumi, serta kelak dihuninya secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.

#### **4. Perhatian Islam terhadap Penanggulangan Kemiskinan**

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin tidak dapat diperbandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan manusia mana pun, baik dari segi pengarahannya maupun dari segi pengaturan dan penerapannya.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> *Ibid*

<sup>127</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, h.49

Memberi makan orang miskin adalah sebuah realisasi dari keimanan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mudatsir:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بَيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾

*Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, Kecuali golongan kanan, Berada di dalam surga, mereka tanya menanya, Tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak Termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, Dan Kami tidak (pula) memberi Makan orang miskin, Dan adalah Kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, Dan adalah Kami mendustakan hari pembalasan."<sup>128</sup>*

Memberi makan orang miskin meliputi juga memberi pakaian, perumahan, dan kebutuhan-kebutuhan pokoknya.<sup>129</sup> Perintah “memberi makan” dalam ayat ini berarti mengajurkan, mendorong, mendoakan.<sup>130</sup> Islam memberi perhatian yang sangat luar biasa terhadap penganggulan kemiskinan untuk kehidupan umat yang sejahtera. Begitu banyak ayat-ayat di Al-Quran yang menghimbau agar memperhatikan golongan miskin dan memberi makan orang miskin, juga ancaman kepada yang membiarkan orang miskin terlunta-lunta, dan cara Islam “memberi makan orang miskin” yaitu dengan zakat sebagai instrumen utamanya.

<sup>128</sup> Q.S. Al-Mudatsir (74): 38-46

<sup>129</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, h.51

<sup>130</sup> *Ibid.* h.52

### a. Zakat pada Periode Makkah

Dalam surat-surat *makkiyah* umat manusia didorong agar memperhatikan dan memberikan hak-hak fakir miskin agar tidak terlunta-lunta dengan dipujinya orang yang berzakat dan dicercanya orang yang melanggarnya.

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ  
يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا  
لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ  
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ ﴿٢٩﴾

*Artinya: Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung. Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>131</sup>*

Selama harta itu milik Allah yang Dia berikan sebagai rezeki bagi sebagian hamba-hambaNya, maka Allah telah menetapkan bagian darinya bagi beberapa kelompok orang dari hamba-hambaNya, yang ditunaikan bagi mereka oleh orang-orang yang memiliki harta. Oleh karena itu Allah menamakan itu sebagai hak bagi yang lain.<sup>132</sup>

Dalam permulaan Quran Surat Luqman Allah SWT berfirman:

<sup>131</sup> QS. Ar-Ruum (30):38-39.

<sup>132</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilail Quran: Di Bawah Naungan Al-Quran, Surat An-Naml* 82 – *Ash- Shaaffaat 101*, Terjemahan dari Judul Asli *Fi Zhilail Quran*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.149



هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٢١﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ  
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: (Al-Quran) Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.<sup>133</sup>

Allah SWT selalu menghubungkan membayar zakat dengan mendirikan shalat di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa ibadah zakat sama pentingnya dengan ibadah shalat. Dalam Quran surat Al-Fushilat Allah mengancam orang-orang Musyrik dan menerangkan ciri-ciri mereka, yaitu tidak membayar zakat dan mengingkari hari akhirat.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ  
وَأَسْتَغْفِرُوهُ ۖ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ  
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang Lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya. (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.<sup>134</sup>

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang mukmin yang baik membayar zakat dan meyakini adanya hari akhirat,

<sup>133</sup> QS. Luqman (31): 3-4

<sup>134</sup> QS. As-Fushilat (41):6-7

sedangkan orang-orang yang mempersekutukan Allah tidak membayar zakat dan mengingkari akhirat.<sup>135</sup>

Pernyataan tentang zakat yang terdapat dalam surat-surat yang turun di Makkah adalah bahwa pernyataan tersebut tidak dalam bentuk *amr* “perintah” yang dengan tegas mengandung arti wajib dilaksanakan, tetapi berbentuk kalimat-kalimat berita biasa.<sup>136</sup> Hal itu karena zakat dipandang sebagai ciri utama seorang Muslim yang beriman dan bertakwa.

Dalam sejarah perundang-undangan Islam zakat baru diwajibkan di Madinah tetapi Quran sudah membicarakan itu dalam ayat-ayat yang terdapat di surat *Makkiyah*. Hal ini karena zakat yang *termaktub* di dalam surat-surat yang turun di Makkah tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah di mana *nishab* dan besarnya sudah ditentukan.<sup>137</sup>

Zakat pada periode Makkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya tetapi diserahkan saja dengan rasa iman, kemurahan hati dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang beriman.

#### **b. Zakat pada Periode Madinah**

Kaum Muslimin di Makkah merupakan pribadi-pribadi yang dihalang-halangi menjalankan agama mereka, tetapi di Madinah mereka sudah merupakan jamaah yang memiliki daerah, eksistensi, dan

---

<sup>135</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.59

<sup>136</sup> *Ibid*, h.60

<sup>137</sup> *Ibid*.

pemerintahan sendiri. Oleh karena itu beban tanggung jawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan perkembangan tersebut yaitu bentuk delimitasi bukan generalisasi, bentuk-bentuk hukum yang mengikat bukan hanya pesan-pesan yang bersifat anjuran.<sup>138</sup>

Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Allah SWT mengancam penimbun-penimbun emas dan perak yang tidak mengeluarkan hak Allah, sebagaimana ayat berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ يَوْمَ نُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۚ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."*<sup>139</sup>

<sup>138</sup> Ibid, h.62

<sup>139</sup> QS. At Taubah (9): 34-35

Para ulama mengatakan bahwa ancaman dalam ayat ini memang berat oleh karena sifat kikir manusia. Tetapi jika mereka takut pada ancaman yang berat itu mereka tentu akan segera patuh kepada perintah Allah.<sup>140</sup>

Dengan ayat yang tegas ini, Allah menghentikan keserakahan dan sifat tamak manusia. Dengan menyerahkan harta kepada kaum miskin maka akan tumbuh sifat persaudaraan dan menekan keinginan-keinginan rakus manusia sebab untuk mentaati perintah Allah SWT. Oleh karena itu pada masa periode Madinah, zakat menjadi sebuah perintah yang disusun secara normatif dan jelas batasan dan ukurannya agar umat Islam dapat menerapkannya dengan mudah.

---

<sup>140</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, h.64